

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA
TIMUR**

**KONTRIBUSI PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
UNTUK PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (SDGS), PENURUNAN EMISI, DAN
DAMPAK TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT**



Oleh:

ADINDA RAHMA TRIYANIARTA

NIM 101911133090

**DEPARTEMEN KESEHATAN LINGKUNGAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

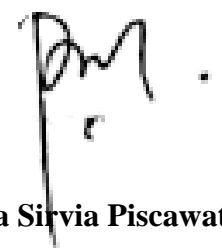
2022

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG MBKM
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR**

Disusun Oleh :

ADINDA RAHMA TRIYANIARTA

101911133090

<p>Dosen Pembimbing Magang MBKM Departemen Kesehatan Lingkungan</p> <p>Dr. R. Azizah, SH., M.Kes NIP. 196712311993032003</p>	<p>Pembimbing Lapangan Magang MBKM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur</p>  <p>Vita Sirvia Piscawati, S.Si NIP. 198703122011012023</p>
<p>Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan</p> <p>Dr. Lilis Sulistyorini., Ir., M.Kes NIP. 196603311991032002</p>	<p>Koordinator Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat</p> <p>Dr. Muji Sulistyowati S.KM, M.Kes NIP. 197311151999032002</p>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	4
1.3. Manfaat.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Program Kampung Iklim.....	6
2.2. Sustainable Development Goals (SDGs).....	9
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	12
3.1. Lokasi Magang.....	12
3.2. Waktu Magang.....	12
3.3. Metode Pelaksanaan Magang.....	14
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
3.5. Teknik Analisis Data.....	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
4.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.....	15
4.2. Gambaran Umum Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.....	18
4.3. PROKLIM dan Kontribusinya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).....	20
4.4. PROKLIM dan Kontribusinya terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.....	23
4.5. Dampak PROKLIM Terhadap Kesehatan Masyarakat.....	24
4.6. Progress Capaian PROKLIM di Wilayah Jawa Timur.....	26
BAB V PENUTUP.....	30
5.1. Kesimpulan.....	30
5.2. Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31
LAMPIRAN.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Kegiatan Magang.....	12
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi DLH Prov Jatim	16
Gambar 2 Struktur Organisasi Bidang Tata Lingkungan DLH Prov Jatim	20
Gambar 2 Peta Sebaran Proklamasi di Provinsi Jawa Timur	27
Gambar 3 Diagram Wilayah Proklamasi di Jawa Timur tahun 2012 - 2022	28
Gambar 4 Jumlah Keikutsertaan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2022	28
Gambar 5 Grafik PROKLAMASI di Jawa Timur tahun 2012-2022	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Logbook Kegiatan Harian	33
Lampiran II Dokumentasi Magang	37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud, Universitas Airlangga paham betul bahwa pendidikan tidak hanya bisa didapatkan secara formal, namun juga secara informal. Tidak hanya secara akademis di kelas saja, namun juga dengan praktiknya, salah satu penerapannya adalah dengan turut serta berpartisipasi dalam program MBKM. Salah satu fakultas yang ikut mendukung program MBKM tersebut adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat ini pun terbagi menjadi beberapa departemen antara lain departemen Biostatistika, Epidemiologi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Administrasi Kebijakan Kesehatan, Gizi Kesehatan, serta Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Salah satu departemen yang ada pada Fakultas Kesehatan Masyarakat dan berkaitan dengan program magang ini adalah Departemen Kesehatan Lingkungan. Departemen ini memfokuskan perhatian pada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan isu-isu mengenai kesehatan lingkungan.

Perkembangan peradaban manusia dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan, namun juga berdampak negatif sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan. Salah satu permasalahan saat ini adalah pemanasan global yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) seperti Karbondioksida (CO_2), Metana (CH_4), dan N_2O , yang dihasilkan dari beragam aktivitas manusia menyebabkan bertambahnya radiasi sinar matahari yang terperangkap di atmosfer dan berdampak pada kenaikan suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. Selanjutnya pemanasan global akan memicu terjadinya perubahan iklim yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia di muka bumi, termasuk di Indonesia. Perubahan iklim telah menyebabkan berubahnya pola hujan, naiknya muka air laut, terjadinya badai dan gelombang tinggi, serta dampak merugikan lainnya yang mengancam kehidupan masyarakat. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti kekeringan, banjir, longsor, gagal



panen, rob, serta meningkatnya wabah penyakit terkait iklim seperti malaria, demam berdarah dan diare (Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, 2017). Dampak dari perubahan iklim dalam pembangunan nasional mengakibatkan kenaikan dan perubahan suhu serta mengurangi sumber daya alam (Ni'mah and Maruf, 2019).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan. Susunan organisasi di dalam Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas Sekertariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, UPT, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Program Kampung Iklim merupakan salah satu program yang berada di bawah Seksi Pemeliharaan LH yang ada di Bidang Tata Lingkungan DLH Provinsi Jawa Timur.

Perubahan iklim memicu krisis sosio-ekologi yang besar dan kuat di seluruh dunia. Masalah menjadi lebih kompleks karena krisis tidak merata. Generasi mendatang lebih rentan terhadap risiko perubahan iklim dibandingkan generasi saat ini. Sehingga keadilan iklim mengemuka dan ketahanan iklim menjadi jawabannya. Ketahanan iklim dapat dimulai di tingkat tapak, misalnya dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami perubahan iklim dan menerapkan inisiatif adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kebijakan



pemerintah (Albar *et al.*, 2017). Salah satu upaya pemerintah menindaklanjuti perubahan iklim yang saat ini terjadi. Pemerintah membuat sebuah program yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (PROKLIM). Program Kampung Iklim (PROKLIM) merupakan program berlingkup nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong seluruh pihak aktif dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK (Ni'mah and Maruf, 2019).

ProKlim merupakan kegiatan yang memadukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak—yaitu tingkat perdesaan—dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah. ProKlim ditargetkan untuk diterapkan pada 20.000 perkampungan di seluruh Indonesia pada tahun 2024, dan diharapkan program ini, rencana penyerapan gas rumah kaca (GRK) dapat diadaptasi juga. Pelaksanaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) sudah sebagian dilaksanakan di desa maupun kelurahan dalam Provinsi yang ada di Indonesia. Pelaksanaan PROKLIM diharapkan tidak hanya untuk mengatasi masalah perubahan iklim tetapi juga berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Frida, 2020).

SDGs (Sustainable Development Goals) adalah sebuah kesepakatan terkait tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai pengganti MDGs (Millenium Development Goals) yang berlaku tahun 2015-2030 yang disepakati lebih dari 190 negara, berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan. Menurut SDGs, Pembangunan berkelanjutan di suatu negara berhasil dengan melibatkan peranan dari pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2016 telah sesuai dengan salah satu tujuan SDGs yaitu aksi perubahan iklim terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Tujuan nasional 13 TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan

korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Peran industri dan pendidikan saat ini berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan bangsa. Industri menjadi penunjang kebutuhan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kesinambungan dan kerjasama antara industri dengan institusi pendidikan agar mahasiswa mampu menerapkan ilmu atau kompetensi yang didapat selama menjalani masa pendidikan di dunia kerja secara langsung.

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan umum

Kegiatan dilakukan dengan tujuan menganalisis kegiatan PROKLIM terhadap kontribusinya dalam mendukung pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Mempelajari struktur organisasi dan prosedur kerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
2. Mempelajari gambaran umum Bidang Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
3. Mendeskripsikan Keterkaitan PROKLIM dan kontribusinya terhadap Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
4. Mendeskripsikan Keterkaitan PROKLIM dan kontribusinya terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
5. Mendeskripsikan Dampak PROKLIM terhadap Kesehatan Masyarakat
6. Mendeskripsikan progres capaian Proklam Di Wilayah Jawa Timur tahun 2012 - 2022

1.3. Manfaat

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya.

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Mendapat wawasan dan pengalaman ilmu pengetahuan dan ketrampilan



serta pengalaman dalam penyesuaian sikap di instansi unit kerja serta mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada kondisi kerja yang sebenarnya.

- b. Mengembangkan cara berpikir, mengatasi dan mengantisipasi suatu permasalahan dengan berdasar pada teori yang didapat serta dikaitkan dengan kondisi sesungguhnya.
- c. Memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
- d. Menambah wawasan, keterampilan, serta kemampuan berkomunikasi dalam dunia kerja.
- e. Mendapatkan gambaran tentang kondisi instansi yang sebenarnya dan menambah ilmu yang tidak diajarkan selama perkuliahan.
- f. Melatih kemampuan berkerjasama dengan orang lain dalam satu tim.

1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

- a. Terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu Universitas Airlangga dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam hal pendidikan.
- b. Mencetak lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang siap terjun dalam dunia kerja dan terampil dalam melaksanakan tugas.
- c. Memberikan masukan mengenai kebutuhan yang diperlukan tenaga kerja agar terampil dibidangnya dengan penerapan kurikulum yang diterapkan di Universitas Airlangga.

1.3.3 Manfaat Bagi Perusahaan (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur)

- a. Membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada pada instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
- b. Mendapat masukan dan saran untuk perbaikan pelaksanaan Bidang Tata Lingkungan Seksi Pemeliharaan LH
- c. Menjadi sarana untuk menjembatani hubungan kerja sama dengan Universitas Airlangga Surabaya di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Program Kampung Iklim

Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut PROKLIM adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau Dusun dan paling tinggi setingkat Kelurahan atau Desa.

2.1.1 Kampung Iklim

Lingkungan hidup untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak melaksanakan aksi lokal dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan upaya pengurangan emisi gas ruang kaca (Bappenas, 2011). Dikutip dari Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim program kampung iklim yang selanjutnya disebut Proklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2022). Proklim sebagai upaya tindak lanjut Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan. Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) merupakan program berbasis masyarakat dengan lingkup nasional yang dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perubahan iklim yang telah dilaksanakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.



Peraturan Menteri LHK No. 84/2016, Proklam merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ketentuan sebagai berikut (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2015):

1. Lokasi administratif paling rendah dalam wilayah RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang sudah melakukan mitigasi adaptasi perubahan iklim secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan penguatan kapasitas terhadap mitigasi adaptasi perubahan iklim dan penurunan emisi GRK.
3. Menerapkan *bottomup* approach dalam program ketahanan iklim.
4. Memberikan pengakuan terhadap upaya mitigasi adaptasi perubahan iklim yang telah dilakukan masyarakat disekitar lokasi.

Pelaksanaan Proklam mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, dimana di dalamnya terkandung komponen utama, syarat pengusulan, penilaian dan kategori Proklam. Dalam peraturan menteri tersebut juga disinggung bahwa Proklam dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2015).

Proklam adalah program sertifikasi yang diprakarsai oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam mengimplementasikan tindakan di bidang iklim mengubah mitigasi dan adaptasi. Proklam bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lokal akan masalah perubahan iklim dan mempromosikan penerapan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Hal ini membuat orang kurang rentan dan lebih tahan terhadap bencana perubahan iklim. Proklam mencakup serangkaian kegiatan perencanaan, informasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pengkajian dan desa iklim. Ghina and Zunariyah, (2017) menyatakan Proklam merupakan suatu kegiatan pengelolaan lingkungan yang membutuhkan peran dari aktor, modal sosial, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

2.1.2 Kegiatan Adaptasi



Kegiatan adaptasi adalah kegiatan yang telah dilaksanakan tingkat lokal dalam menangani dampak perubahan iklim, yaitu:

- a. Pembuatan sumur resapan, pembenahan selokan, membuat embung-embung sebagai sarana, penambahan catchment area khususnya dimusim penghujan sehingga bisa menambah cadangan sumber daya air di lingkungan sekitar saat musim kemarau nanti, dan mengurangi limpasan air sehingga mencegah banjir.
- b. Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor dengan pembuatan sumur resapan, embung, dan rokak.
- c. Meningkatkan daya serap air, mengurangi volume laju air di permukaan air, mengurangi genangan air, secara tidak langsung meminimalkan terjadinya banjir, meningkatkan aktifitas fauna tanah dan pertumbuhan tanaman di sekitar lubang biopori sebagai media penghasil kompos.
- d. Penampungan air hujan, contohnya dengan pembuatan bak penampung air hujan (PAH).
- e. Peningkatan ketahanan pangan, contohnya dengan penanaman tanaman sayuran, pemanfaatan buah hasil dari penghijauan.
- f. Pengendalian vektor penyakit terkait perubahan iklim, contohnya menutup genangan air menjadi taman, memberi hewan lele pada embung.

2.1.3 Kegiatan Mitigasi

Kegiatan mitigasi adalah kegiatan yang telah dilaksanakan tingkat lokal untuk mengurangi emisi GRK yaitu :

- a. Pengelolaan sampah (limbah padat), Untuk mengurangi pencemaran dari limbah sampah padat, warga diberdayakan dengan merubah perilaku dalam pengelolaan sampah yaitu sampah dipilah dengan prinsip 3R (reuse, reduce, recycle) sehingga dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk 21 ekonomis melalui bank sampah sehingga meningkatkan ekonomi warga sekitar.
- b. Peningkatan tutupan
- c. Vegetasi: penanaman tanaman-tanaman sayuran di dalam pot-pot, dengan keterbatasan lahan disekitar lokasi upaya penghijauan ini untuk menambah vegetasi, sehingga menambah cadangan oksigen lebih banyak dari proses

- fotosintesis yang ada pada tanaman. Selain itu hasil panen sayuran dapat memiliki nilai jual dan manfaat bagi warga.
- d. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah cair.
 - e. *Vertical garden* bermanfaat untuk mengisolasi sinar matahari (mereduksi sinar matahari) dan menyerap karbon dioksida dan polusi yang berasal dari dalam rumah.
 - f. Pengelolaan budidaya pertanian, pertanian terpadu.
 - g. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan atau lahan.
 - h. Penggunaan energi terbarukan dan konservasi energi yaitu upaya memanfaatkan energi yang ada pada alam (sinar matahari) dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik, sehingga menghemat konsumsi energi listrik.

2.2. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan. Pada tahun 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir. Berbeda dari pendahulunya Millenium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.

Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, melawan ketimpangan, memastikan perlindungan terhadap alam dan sumber daya yang terkandung didalamnya, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan.



Sustainable Development Goals dianggap layak atau lebih baik dari Millenium Development Goals yaitu SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan programnya.

Konsep SDGs merupakan hasil dari kegiatan konferensi di Rio de Janeiro yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012 berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini diselenggarakan dengan maksud dapat mencapai tujuan bersama yakni mampu menjaga keseimbangan tiga hal pokok dalam pembangunan berkelanjutan meliputi lingkungan, sosial dan ekonomi (Unpad Press, 2018). Guna mencapai tiga hal pokok dalam pembangunan berkelanjutan tersebut SDGs mempunyai 5 asas utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan untuk mewujudkan tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa pengentasan kemiskinan, mencapai kesetaraan serta mengatasi perubahan iklim. Demi mencapai tiga tujuan mulia tersebut disusunlah 17 tujuan global (Alfajri, Suwignyo, 2020).

17 Pilar SDGs

1. Tanpa Kemiskinan ; Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan ; Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan ; Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas ; Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.
5. Kesetaraan Gender ; Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi ; Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau ; Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak ; Mendukung



perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur ; Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan ; Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas ; Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab ; Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim ; Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut ; Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat ; Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian ; Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan ; Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Lokasi Magang

Kegiatan magang ini dilakukan di Bidang Tata Lingkungan Seksi Pemeliharaan LH Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Wisata Menanggal No.38, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60234.

3.2. Waktu Magang

Waktu pelaksanaan magang ini pada tanggal 5 Oktober 2022 sampai tanggal 5 Desember 2022. Jam kerja dimulai dari hari senin sampai jumat jam 08.00-16.00 WIB. Berikut tabel rincian rangkaian kegiatan magang di Bidang Tata Lingkungan Seksi Pemeliharaan LH Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur:

Tabel 1 Rincian Kegiatan Magang

No.	Jenis Kegiatan	September				Oktober				November				Desember	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1.	Persiapan dan Pembekalan Magang														
2.	Mempelajari struktur dan tupoksi organisasi, program kerja, serta penerapan dan evaluasi upaya pengendalian risiko lingkungan di Dinas Lingkungan														



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas Energi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan.

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

A. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.

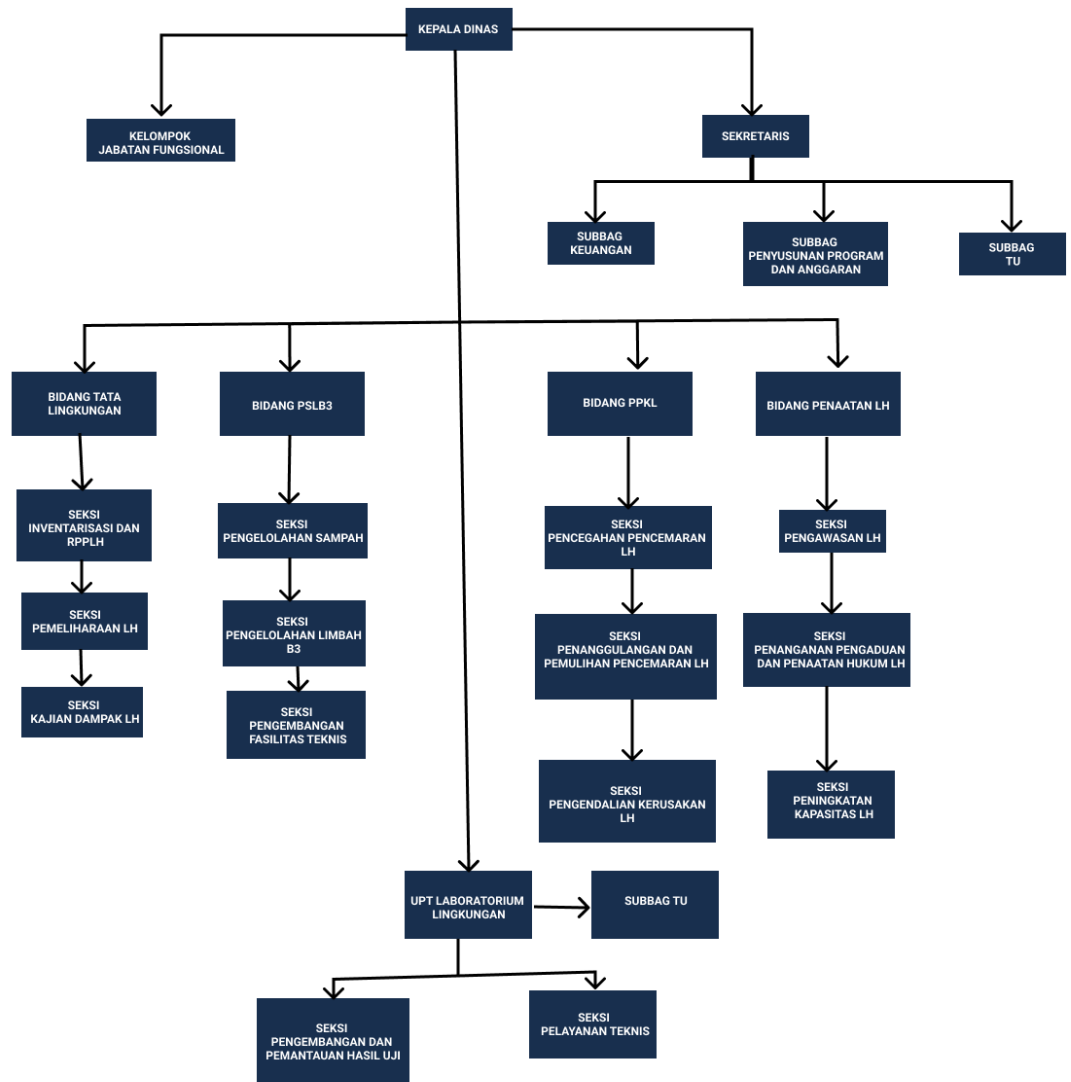
B. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Gambar 1 Struktur Organisasi DLH Prov Jatim



Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat membawahi:
 3. Sub Bagian Tata Usaha;
 4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan



5. Sub Bagian Keuangan
6. Bidang Tata Lingkungan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Bidang Tata Lingkungan membawahi:
 - Seksi Inventarisasi dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
7. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta pengembangan fasilitas teknis pengelolaan sampah dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi:
 - Seksi Pengelolaan Sampah;
 - Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
8. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi:
 - Seksi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
9. Bidang Pnaatan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, pengaduan dan panaatan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Bidang Pnaatan Lingkungan Hidupmembawahi:
 - Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup;



- Seksi Penangan Pengaduan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup; dan
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
10. UPT Laboratorium Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis laboratorium lingkungan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. UPT Laboratorium Lingkungan membawahi:
- Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - Seksi Pengembangan Laboratorium dan Pemantauan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam bidang lingkungan hidup terdapat kelompok jabatan fungsional, antara lain: jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, dan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, sedangkan kelompok jabatan fungsional selain bidang lingkungan hidup, antara lain: jabatan fungsional Pranata Komputer, dan jabatan fungsional Analis Kepegawaian.

4.2. Gambaran Umum Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

4.2.1 Tugas Pokok Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

4.2.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Lingkungan, mempunyai fungsi:

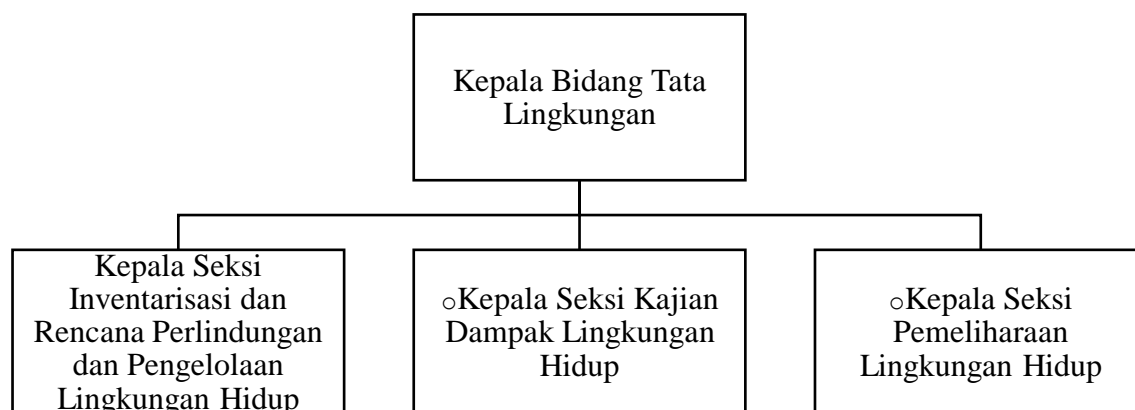
- a. perumusan kebijakan tata lingkungan;
- b. perumusan kebijakan perencanaan, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;



- d. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup ;
- g. penyusunan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis provinsi;
- h. pelaksanaan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- i. pengoordinasian pelaksanaan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- j. pembinaan tata laksana Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan penilaian dokumen lingkungan serta proses izin lingkungan ;
- k. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam;
- l. pemberian rekomendasi izin lingkungan;
- m. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- n. penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- o. perencanaan, penetapan kebijakan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- p. pemantauan, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- q. pelaksanaan sosialisasi hasil penataan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan;
- r. penyusunan kebijakan, pengembangan dan pelaksanaan penghargaan bidang lingkungan hidup terkait pelestarian sumber daya alam;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang tata lingkungan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

4.2.3 Struktur Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

Gambar 2 Struktur Organisasi Bidang Tata Lingkungan DLH Prov Jatim



4.3. PROKLIM dan Kontribusinya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pengendalian Perubahan iklim merupakan suatu upaya komprehensif yang meliputi adaptasi dan mitigasi yang dapat ditunjukkan (demonstrable), diukur (measurable), dilaporkan (reportable), dan diverifikasi (verifiable), serta didukung dengan pendanaan, teknologi dan kapasitas pendukung lainnya (Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2020). ProKlim sebagai sebuah gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat merupakan aksi nyata di tingkat tapak yang sekaligus dapat diukur, dilaporkan, dan diverifikasi. ProKlim merupakan inisiatif berbasis masyarakat melalui aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam upaya meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi GRK atau berkontribusi menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2⁰C sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Paris. Menahan kenaikan suhu rata-rata global ini menjadi prasyarat daya dukung lingkungan dalam pencapaian goals pada Sustainable Development. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa kehadiran ProKlim yang basisnya di tingkat tapak, mendukung pencapaian tujuan SDGs.

ProKlim diimplementasikan melalui dua komponen utama program, yaitu komponen adaptasi dan komponen mitigasi. Komponen adaptasi mempunyai program-program yang terdiri dari:

1. Pengendalian kekeringan banjir, dan longsor;
2. Peningkatan ketahanan pangan;
3. Penanganan kenaikan muka air laut, rob, dan abrasi; dan
4. Pengendalian penyakit terkait iklim.

Komponen mitigasi mempunyai program-program yang terdiri dari:

1. Pengelolaan sampah, serta limbah padat dan cair;
5. Penggunaan energi baru terbarukan;
6. Budidaya pertanian rendah emisi GRK;
7. Peningkatan tutupan vegetasi; dan
8. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Masyarakat pada lokasi ProKlim bukan hanya sebagai target/penerima manfaat atas aksi yang dilakukannya namun sekaligus sebagai pelaku pembangunan sehingga sesuai dengan prinsip inklusivitas pencapaian SDGs yaitu “tidak ada satupun yang tertinggal (no one left behind)”. Berdasarkan berbagai aspek kegiatan ProKlim, secara umum kegiatan mitigasi di dalam proklam banyak memberikan kontribusi terhadap kehidupan sehat dan sejahtera (SDG 3), air bersih dan sanitasi layak (SDG 6), industri, inovasi, dan infrastruktur (SDG 9), perubahan iklim (SDG 13), pengentasan kemiskinan (SDG1), pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), serta ekosistem lautan (SDG 14). Sedangkan kegiatan adaptasi banyak berkontribusi terhadap kehidupan sehat dan sejahtera (SDG 3), air bersih dan sanitasi layak (SDG 6), dan perubahan iklim (SDG 13) (Frida, 2020). Pembangunan Kampung Iklim di seluruh Indonesia diharapkan juga dapat menjadi praktik baik mengenai TPB (Muhammad Dimas Mahardika, 2021). ProKlim diharapkan menjadi pintu dalam upaya penguatan aksi adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak, terutama pada daerah yang teridentifikasi rentan terhadap dampak perubahan iklim (Ditjen PPI, 2017b). Keseriusan penanganan perubahan iklim melalui ProKlim diperkuat dengan ditetapkannya target 20.000 kampung iklim pada tahun 2024 sebagaimana yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Climate



Adaptation Summit 2021 (Ditjen PPI, 2021). Target tersebut tidak dapat dicapai dengan mudah, oleh karenanya penting untuk mengidentifikasi faktor pendukung pencapaian target ProKlim. Setidaknya ada empat strategi untuk mewujudkannya, yaitu implementasi dan konektivitas kebijakan, penguatan kelembagaan di tingkat sub nasional, peningkatan kapasitas ProKlim, dan ragam aksi ProKlim di tingkat tapak termasuk proses monitoring, reporting, dan verification pada SRN PPI (Rofi'i, 2021).

Tujuan ke 13 SDGs menjadi target utama atas implementasi ProKlim. Selain poin 13, kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam ProKlim juga mendukung tujuan – tujuan SDGs lainnya. Aspek pengendalian penyakit terkait iklim dengan kegiatan pengendalian vektor, sanitasi total berbasis masyarakat serta pola hidup bersih dan sehat akan mendukung pengurangan berbagai penyakit menular dan tidak menular sebagaimana tujuan ke 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Mengurangi kerugian ekonomi langsung berhubungan dengan produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana termasuk bencana terkait air melalui kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir dan longsor, greenbelt, rancang bangun yang adaptif, struktur perlindungan buatan dan relokasi pemukiman mendukung tujuan SDGs poin ke 11. Kegiatan pengelolaan sampah (limbah padat), untuk mengurangi pencemaran dari limbah sampah padat dengan memberdayakan warga dengan merubah perilaku dalam pengelolaan sampah yaitu sampah dipilah dengan prinsip 3R (reuse, reduce, recycle) sehingga dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk ekonomis melalui bank sampah sehingga meningkatkan ekonomi warga sekitar mendukung tujuan SDGs poin 9 dan 8. Pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor serta peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi dapat mendukung tujuan 15. Selain itu, ditambah dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan maka dapat menghambat deforestasi, merestorasi hutan terdegradasi, meningkatkan aforestasi dan reforestasi, memerangi desertif

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hampir semua kegiatan program kampung iklim sejalan dengan SDGs. Terlihat bahwa jika semua aspek kegiatan dalam ProKlim dilakukan dengan baik, maka target penguatan ketahanan



dan kapasitas adaptif terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam bagi warga negara dapat tercapai.

4.4. PROKLIM dan Kontribusinya terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Program Kampung Iklim (Proklam) memiliki perannya tersendiri dalam pengendalian perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Komitmen Indonesia dalam Paris Agreement telah diratifikasi oleh Negara melalui Undang – undang No. 6 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement. Indonesia juga telah menyatakan komitmennya pada Conference of Parties (COP) 15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2020. Komitmen Indonesia tersebut diperkuat melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan November 2016 dengan ditetapkannya rget unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai dengan 41% dibandingkan skenario business as usual (BAU) di tahun 2030. Secara nasional, target penurunan emisi pada tahun 2030 berdasarkan NDC adalah sebesar 834 juta ton CO₂e pada target unconditional (CM1) dan sebesar 1,081 juta ton CO₂e pada target conditional (CM2).

Untuk memenuhi target tersebut, secara nasional telah dilakukan berbagai aksi mitigasi pada semua sektor oleh penanggung jawab aksi mitigasi. Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan berbagai kegiatan dan langkah implementasi pada tingkat Nasional dan lokal. Dalam rangka mengurangi emisi karbon, masyarakat luas perlu dilibatkan. Emisi karbon itu sendiri tak lepas dari kegiatan antropogenik. Maka, pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam mengendalikan perubahan iklim melalui program kampung iklim (Proklam). Masyarakat akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Melalui PROKLIM upaya mitigasi dapat dilaksanakan dengan melakukan pengelolaan terhadap sumber-sumber penghasil gas rumah kaca, melalui kegiatan-kegiatan seperti:

- a. Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair
- b. Menggunakan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi
- c. Melakukan budidaya pertanian rendah emisi GRK
- d. Meningkatkan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi
- e. Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam penutupan Festival Iklim tahun 2021, menyatakan bahwa Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan contoh nyata pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak yang mampu berkontribusi menurunkan emisi 761.445,1 ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e). Hasil tersebut didapatkan dari perhitungan pada 312 lokasi Proklim yang telah diverifikasi di tahun 2021 dengan aplikasi Spektrum. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan di proklim seperti pengelolaan sampah sangat mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca yang sudah menjadi komitmen Indonesia.

4.5. Dampak PROKLIM Terhadap Kesehatan Masyarakat

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, sehinggaantisipasi perubahan iklim terhadap sektor kesehatan di Indonesia dan lingkungannya merupakan hal yang sangat penting. Kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap status kesehatan, jika kondisi lingkungan tidak baik maka dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan pada masyarakat. Sanitasi lingkungan yang buruk dapat menyebabkan penularan penyakit yang demikian terus menyebar. Beberapa penyakit menular diantaranya penyakit malaria, TBC, filariasis, demam berdarah dengue, kolera, diare dan sebagainya. Misalnya pada kasus Demam berdarah, penyakit demam berdarah disebut juga Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) karena disertai gejala demam dan pendarahan, sedangkan penyebabnya adalah virus yang tergolong virus dengue (Parjiono, 2017).

Demam Berdarah Dengue memiliki korelasi yang kuat dengan iklim, karena kasus DBD biasanya terjadi pada awal dan akhir musim hujan (WHO, 2019). Peningkatan intensitas curah hujan akibat perubahan iklim mengindikasikan peningkatan daerah perkembangbiakan nyamuk sehingga meningkatkan populasi nyamuk. Penelitian yang dilakukan Nosrat *et al.* (2021)



menggunakan perangkap nyamuk dengan anomali curah hujan menemukan bahwa jumlah telur nyamuk akan meningkat pada curah hujan yang ekstrim. Berawal dari banjir yang menyebabkan genangan air di beberapa lokasi tempat nyamuk bertelur. Pengendalian penyakit DBD juga menjadi salah satu prioritas nasional pengendalian penyakit menular di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014, dan tercantum pula dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.01/160/1/2010. Mengingat obat untuk membunuh virus Dengue hingga saat ini belum ditemukan dan vaksin untuk mencegah penularan DBD masih dalam tahap uji coba, maka cara utama yang dapat dilakukan sampai saat ini adalah dengan pengendalian vektor penular (*Aedes aegypti*). Pengendalian vektor ini dapat dilakukan pada fase pradewasa (telur, larva/jentik, pupa) maupun fase dewasa (nyamuk dewasa). Beberapa upaya yang dilakukan dalam pengendalian vector antara lain upaya pemutusan rantai penularan secara terpadu melalui penyuluhan, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), larvasidasi dan fogging focus (Budiman and Oetami, 2020).

Menurut penelitian Suci (2020) adaptasi mitigasi program kampung iklim merupakan faktor terbesar dalam suksesnya pemahaman masyarakat mengenai perubahan iklim yang terjadi. Termasuk lingkungan fisik yang merupakan hal yang sangat penting dan harus dikelola dengan baik agar masyarakat bisa beradaptasi dan mitigasi dengan perubahan iklim untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dimana pengendalian penyakit iklim sendiri juga menjadi salah satu poin kegiatan yang ada dalam program kampung iklim. Sesuai dengan upaya yang dilakukan untuk pengendalian vector dbd, di dalam proklamasi juga telah dilaksanakan kegiatan – kegiatan pengendalian vector seperti melaksanakan 3M, pengendalian perindukan nyamuk, modifikasi dan memperbaiki lingkungan, selain itu diadakan juga kegiatan sistem kewaspadaan dini untuk mengantisipasi terjadinya penyakit akibat perubahan iklim seperti diare, malaria, DBD, kegiatan sanitasi dan air bersih yang dilakukan antara lain dengan cara:

- Memiliki rumah yang sehat.
- Tersedia akses air bersih.
- Tersedia akses jamban.

- Masyarakat berperilaku Hygiene

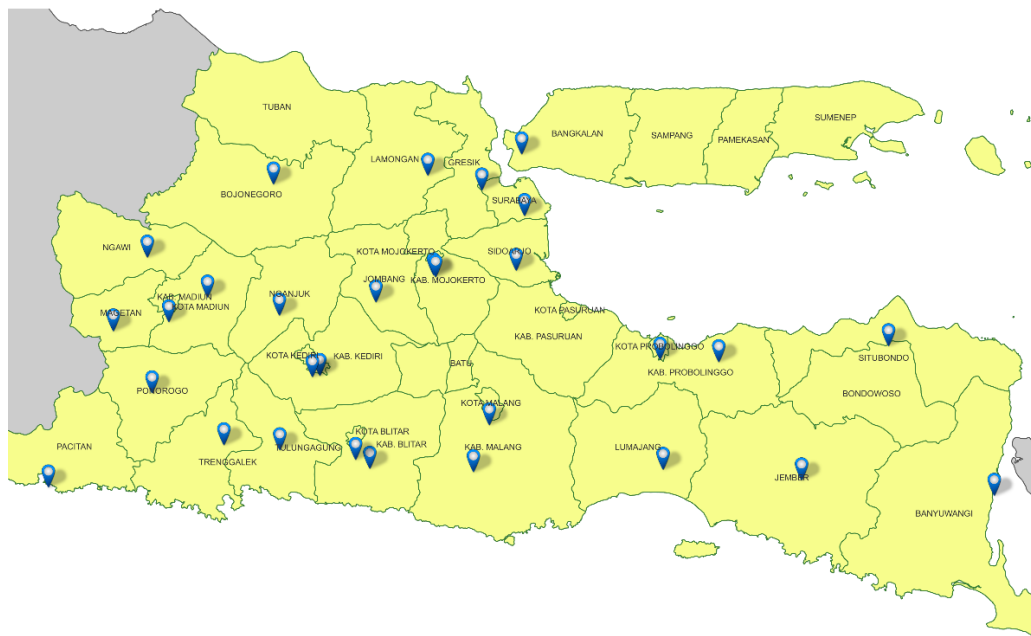
Serta terakhir terkait kegiatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dimana masyarakat telah melaksanakan PHBS dengan pola kebiasaan makan menu seimbang, mencuci tangan dengan sabun, melakukan pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan dan lain-lain (Emilda *et al.*, 2017).

Kegiatan yang dilakukan dalam proklamasi seperti pengelolaan sampah dapat mengendalikan populasi nyamuk *Aedes aegypti*, sehingga penularan DBD dapat dicegah atau dikurangi (Rosmala and Rossidah, 2019). Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Syamsul (2019) yang menerangkan bahwa pengelolaan sampah dengan nilai $p=0,000$ berhubungan dengan kejadian demam berdarah di Sulawesi Selatan.

4.6. Progress Capaian PROKLIM di Wilayah Jawa Timur

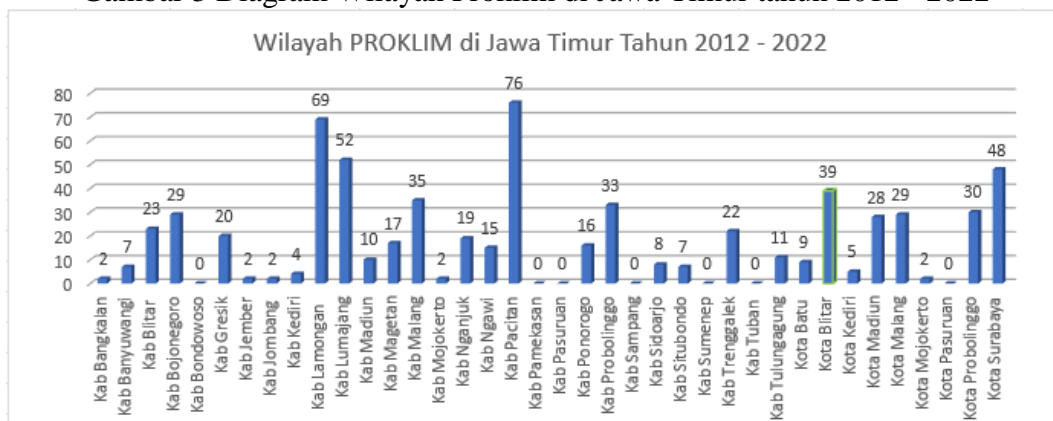
Penguatan peran ProKlim sebagai aksi adaptasi dan mitigasi menjadi langkah awal dalam pencapaian SDGs yang sekaligus berkontribusi dalam penurunan emisi global. Oleh karenanya, penjaringan lokasi ProKlim di tingkat tapak harus terus dilakukan. Program Kampung Iklim yang diluncurkan pertama kali tahun 2011 telah berkembang dan mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Termasuk di dalamnya Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup secara aktif selalu mengirimkan daftar usulan lokasi proklamasi setiap tahunnya. ProKlim berfungsi sebagai instrumen pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat dalam menjembatani komunikasi dan pertukaran informasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kelompok terkecil di tingkat masyarakat, pengurus desa/kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi, hingga Kementerian/Lembaga di tingkat nasional, serta melibatkan juga peran aktif dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah. Dari tahun 2012 sampai dengan 2022 tercatat sebanyak 671 lokasi di Jawa Timur telah ditetapkan sebagai penerima penghargaan ProKlim berupa trophy dan sertifikat. Penerima penghargaan ProKlim telah mulai menyebar ke beberapa wilayah, tidak hanya terkonsentrasi di Kabupaten/Kota tertentu, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.

Gambar 2 Peta Sebaran Proklim di Provinsi Jawa Timur
PETA SEBARAN PROKLIM DI JAWA TIMUR TAHUN 2012 - 2022



Total pengusulan ProKlim di masing-masing daerah selama periode tahun 2012-2022 menggambarkan tingkat partisipasi daerah dalam pelaksanaan ProKlim yang dapat dilihat dalam grafik pada gambar 3. Pada gambar 3 terlihat bahwa Kabupaten yang memiliki lokasi proklim terbanyak dari tahun 2012 – 2022 adalah Kabupaten Pacitan dan masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang sama sekali belum memiliki lokasi ProKlim dari tahun 2012-2022. Hal tersebut bukan berarti wilayah yang belum tersentuh ProKlim mempunyai tingkat adaptasi atau ketahanan iklim yang rendah ataupun kurang peduli terhadap perubahan iklim. Terdapat kemungkinan bahwa warga wilayah tersebut sudah melakukan aksi adaptasi dan mitigasi namun mereka tidak mengetahui bahwa yang dilakukan merupakan bagian dari pengendalian perubahan iklim.

Gambar 3 Diagram Wilayah Proklam di Jawa Timur tahun 2012 - 2022



Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan ProKlim menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada periode waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2022 yang cenderung stabil, seperti terlihat dalam grafik pada Gambar 4.

Gambar 4 Jumlah Keikutsertaan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2022



Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Gambar 5 Grafik PROKLIM di Jawa Timur tahun 2012-2022



Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Pada Gambar 5 di atas terlihat bahwa jumlah wilayah yang tercatat di data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat dan dalam 10 tahun sebanyak tercatat sebanyak 671 lokasi. Sehingga saat ini Provinsi Jawa Timur telah menyumbang 3,4% dari 20.000 target lokasi ProKlim yang ditargetkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa perlu usaha ekstra guna pencapaian target, setidaknya untuk dapat mencapai 20% dari jumlah desa di tiap Provinsi. Artinya, upaya peningkatan usulan ProKlim dapat terus dipacu dan ditingkatkan dengan beragam strategi (Rofi'i, 2021).

Pengusulan lokasi ProKlim dilakukan oleh berbagai pihak yang mempunyai informasi mengenai kegiatan yang dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan telah berjalan dengan baik pada lokasi tertentu. Lokasi yang didaftarkan sebagai kampung iklim dievaluasi dengan meninjau aspek keragaman

aksi adaptasi, mitigasi, serta kelembagaan dan dukungan keberlanjutan yang ada di lokasi tersebut melalui kegiatan verifikasi lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

ProKlim sebagai gerakan nasional yang menggerakkan masyarakat/komunitas agar melakukan tindakan gabungan adaptasi dan mitigasi, berkontribusi nyata terutama dalam upaya pencapaian tujuan 13 SDGs, penurunan emisi gas rumah kaca, dan memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Lokasi Proklim di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 – 2022 cenderung mengalami peningkatan jumlah dan hingga saat ini tercatat 671 lokasi yang sudah mendapatkan penghargaan baik trophy maupun sertifikat. Jumlah tersebut menyumbang sekitar 3,4% dari target 20.000 lokasi Proklim di tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut perlu ditingkatkan pencapaiannya agar target pemerintah pada tahun 2024 dapat tercapai, dapat memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK dan dapat mendukung tercapainya tujuan SDGs.

5.2. Saran

1. Peningkatan implementasi kebijakan secara berjenjang sampai dengan tingkat tapak melalui penyusunan peraturan tentang Proklim sampai tingkat tapak.
2. Penguatan kelembagaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal di masing-masing wilayah untuk mendorong terwujudnya pengaturan dan lembaga yang berkelanjutan.
3. Peningkatan kapasitas aksi mitigasi dan adaptasi sebagai prasyarat tercapainya SDGs di tingkat tapak secara bertahap dan berkesinambungan.
4. Penguatan peran ProKlim sebagai aksi adaptasi dan mitigasi yang menjadi langkah awal dalam pencapaian SDGs yang sekaligus berkontribusi dalam penurunan emisi global



5. Penguatan strategi komunikasi publik yang menyentuh emosi masyarakat tentang penyelamatan lingkungan terutama ProKlim disertai anggaran edukasi publik yang proporsional

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, I. *et al.* (2017) *Road Map Program Kampung Iklim (ProKlim)*, 2017. Available at: <http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/5>.
- Alfajri, Suwignyo, L. (2020) 'PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN TUNAS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) SISWA TINGKAT SMA/MA SEDERAJAT DI KOTA PEKANBARU UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES DAN RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION', 3(3), pp. 201–208. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.36341/jpm.v3i3.1295>.
- Budiman, B. and Oetami, H. (2020) 'Surveilans Kesehatan Masyarakat: Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Kota Cimahi', *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), p. 214. Available at: <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i2.7290>.
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (2022) *Dampak Perubahan Iklim Berpengaruh Terhadap Timbulnya Penyakit*. Available at: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/301/dampak-perubahan-iklim-berpengaruh-terhadap-timbulnya-penyakit (Accessed: 24 November 2022).
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2020) *BALAI PPI DAN KARHUTLA WILAYAH JAWA BALI NUSRA* -. Available at: <http://ditjenppi.menlhk.go.id/unit-pelaksana-teknis/balai-ppi-dan-karhutla-wilayah-jawa-bali-nusra.html> (Accessed: 6 December 2022).
- Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK (2017) *PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM NoMoR P.1/PPI /SET/KUM.1/2/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM*. Available at: http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/perdirjen/P_1_Pedomannya_Proklam.pdf.
- Emilda, A. *et al.* (2017) *Buku Praktis ProKlim*. Jakarta: Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Available at: <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Frida, N. (2020) *Mengenal Demam Berdarah Dengue*, Alprin.
- Ghina, N.Y. and Zunariyah, S. (2017) 'Kampung Iklim : Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(2), pp. 80–98.



- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2015) 'PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM', *Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, (July), p. 9.
- Muhammad Dimas Mahardika (2021) *Program Kampung Iklim: Solusi Berbasis Kearifan Lokal untuk Penanganan Iklim dari Tingkat Tapak - Localise SDGs Indonesia*. Available at: <https://localisesdgs-indonesia.org/beranda/v/program-kampung-iklim-solusi-berbasis-kearifan-lokal-untuk-penanganan-iklim-dari-tingkat-tapak> (Accessed: 6 December 2022).
- Ni'mah, H. and Maruf, M.F. (2019) 'PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA AKSI MITIGASI DALAM PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) STUDI PADA DESA MOJODESO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO', 7(4). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v7n4.p%25p>.
- Rofi'i, I. (2021) *KONTRIBUSI PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DALAM MENDUKUNG SDGS: SEBUAH REFLEKSI DAN STRATEGI PENCAPAIAN TARGET 20.000 PROKLIM DI TAHUN 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.
- Rosmala, F. and Rossidah, I. (2019) 'Hubungan Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Padat dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar', *Kesehatan Komunitas Indonesia*, 15(1), pp. 23–32. Available at: <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jkki/article/view/986>.
- Suci, I. (2020) 'Analisis Implementasi Program Kampung Iklim Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Di Korong Pasa', *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 1(1), pp. 39–47. Available at: <http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/5>.
- Syamsul, M. (2019) 'Faktor-faktor Lingkungan Meningkatkan Insidensi Demam Berdarah di Sulawesi Selatan', *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(1), pp. 1–7.
- Unpad Press (2018) *Menyongsong SDGs kesiapan daerah-daerah di Indonesia, Unpad Press*. Available at: <http://sdgcenter.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2018/08/Menyongsong-SDGs-Kesiapan-Daerah-daerah-di-Indonesia.pdf>.



LAMPIRAN

Lampiran I Logbook Kegiatan Harian

**LOGBOOK KEGIATAN HARIAN
MAGANG MBKM DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA
TIMUR**

Nama Mahasiswa : Adinda Rahma Triyaniarta
 NIM : 101911133090
 Instansi Magang : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
 Pembimbing Lapangan : Vita Sirvia Piscawati, S.Si
 Dosen Pembimbing : Dr. R. Azizah, SH., M.Kes.

Minggu	Tanggal	Kegiatan
Pertama	5 Oktober 2022	Dilakukan pengarahan dan pengenalan pada masing-masing bidang (Bidang I – Tata Lingkungan), selanjutnya diberikan materi pengantar terkait Program Kampung Iklim untuk dipelajari dan dipahami.
	6 Oktober 2022	Diberikan data mentahan yang berisi wilayah penerima Program Kampung Iklim di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2021. Data yang didapat kemudian diolah secara berkelompok menggunakan excel sesuai dengan lokasi dan tahun.
	7 Oktober 2022	Data yang telah diolah dan dokumentasi hasil verifikasi Proklam 2012-2021 dimasukkan pada website Proklamjatim.com. Selain itu, membantu tim Adiwiyata memindahkan hasil penilaian dari flashdisk ke dalam google drive dan dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota.
Kedua	10 Oktober 2022	Meneruskan tugas mengolah data secara berkelompok menggunakan excel sesuai dengan lokasi dan tahun, dan juga memasukkan data proklam ke website Proklamjatim.com.
	11 Oktober 2022	Membantu kegiatan workshop RPPLH yang dilakukan di Hotel Haris



	12 Oktober 2022	Membantu menjaga stand pameran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Jatim Fair 2022
	13 Oktober 2022	Diberikan kembali data tambahan terkait wilayah proklamasi untuk ditambahkan di data yang sudah diolah di awal
	14 Oktober 2022	Mengunduh berkas dan materi usulan wilayah proklamasi di Jawa Timur untuk tahun 2022 dari gdrive yang diberikan
Ketiga	17 Oktober 2022	Melanjutkan mengunduh berkas usulan wilayah proklamasi 2022 dan mengelompokkannya sesuai Kabupaten/Kota
	18 Oktober 2022	Melanjutkan mengunduh berkas usulan wilayah proklamasi 2022 dan mengelompokkannya sesuai Kabupaten/Kota
	19 Oktober 2022	Mengunduh berkas usulan wilayah proklamasi 2022 dan mengelompokkannya sesuai Kabupaten/Kota
	20 Oktober 2022	Mengunduh berkas usulan wilayah proklamasi 2022 dan mengelompokkannya sesuai Kabupaten/Kota
	21 Oktober 2022	Izin tidak mengikuti kegiatan magang untuk mengikuti kegiatan dies natalis FKM Unair di kampus
Keempat	24 Oktober 2022	Merevisi tugas yang diberikan sebelumnya yaitu mengelompokkan berkas usulan proklamasi 2022 yang diunduh
	25 Oktober 2022	Mempelajari berkas usulan proklamasi 2022
	26 Oktober 2022	Mempelajari materi terkait proklamasi dan data sekunder untuk pembuatan skema pengelolaan lingkungan hidup sebagai learning outcome magang
	27 Oktober 2022	Melanjutkan mempelajari materi terkait proklamasi dan data sekunder untuk pembuatan skema pengelolaan lingkungan hidup sebagai learning outcome magang
	28 Oktober 2022	Mengikuti kegiatan monitoring dan



		penilaian eco pesantren di dua pesantren di wilayah Kabupaten Probolinggo
Kelima	31 Oktober 2022	Mengelompokkan sertifikat penghargaan proklamasi 2022 sesuai dengan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dicatat kelengkapannya sesuai data penerima penghargaan proklamasi tahun 2022
	1 November 2022	Diberikan tugas untuk membuat peta sebaran proklamasi Jawa Timur Tahun 2022, Mencari data koordinat dari semua wilayah proklamasi Jawa timur 2022
	2 November 2022	Melanjutkan mengerjakan tugas membuat peta sebaran wilayah proklamasi Jawa Timur tahun 2022
	3 November 2022	Melanjutkan mengerjakan tugas membuat peta sebaran wilayah proklamasi Jawa Timur tahun 2022 kemudian mengumpulkan hasil tugas tersebut
	4 November 2022	Diberikan tugas untuk membuat peta sebaran 30 lokasi proklamasi tingkat tapak di Jawa Timur dan mengerjakannya
Keenam	7 November 2022	Melanjutkan mengerjakan tugas membuat peta sebaran 30 lokasi proklamasi tingkat tapak di Jawa Timur
	8 November 2022	Diberikan tugas untuk membuat peta kerentanan 30 lokasi proklamasi tingkat tapak di Jawa Timur dan mengerjakannya
	9 November 2022	Melanjutkan mengerjakan tugas membuat peta kerentanan 30 lokasi proklamasi tingkat tapak di Jawa Timur
	10 November 2022	Diberikan tugas untuk membantu menyusun laporan kerentanan 30 lokasi proklamasi tingkat tapak di Jawa Timur
	11 November 2022	Membantu menyusun laporan kerentanan 30 lokasi proklamasi tingkat tapak di Jawa Timur
Ketujuh	14 November 2022	Izin tidak masuk magang dikarenakan ada acara keluarga di Tulungagung
	15 November 2022	Diberikan tugas untuk membuat peta produksi oksigen 30 lokasi proklamasi tingkat tapak di Jawa Timur dan

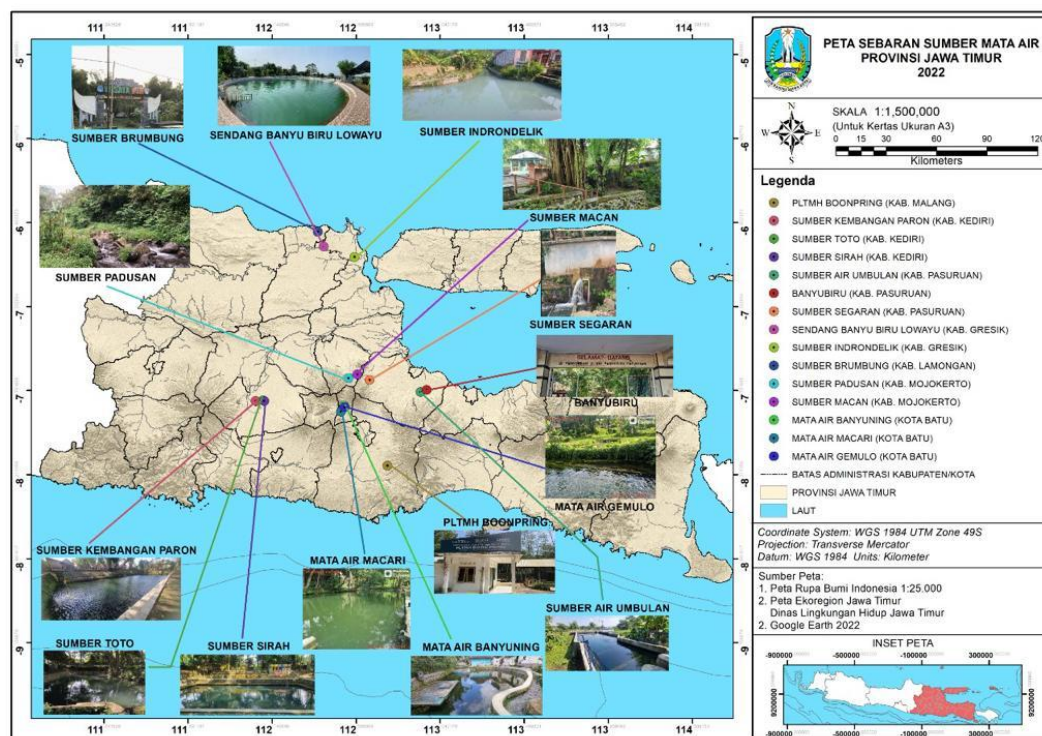


		mengerjakannya
	16 November 2022	Melanjutkan mengerjakan tugas membuat produksi oksigen 30 lokasi proklamasi tingkat tapak di Jawa Timur
	17 November 2022	Mengumpulkan seluruh hasil peta yang ditugaskan
	18 November 2022	Membantu mengurutkan dokumen pengajuan UKL UPL dan mencari data sekunder untuk keperluan tugas magang
Kedelapan	21 November 2022	Mencari data sekunder di Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Jawa Timur
	22 November 2022	Mengikuti pelatihan penggunaan alat pemadam kebakaran/APAR oleh Dinas Kebakaran dan Keselamatan Kota Surabaya di DLH Provinsi Jawa Timur
	23 November 2022	Mempelajari data sekunder yang didapatkan
	24 November 2022	Menganalisis data sekunder yang didapatkan
	25 November 2022	Melakukan inspeksi lingkungan DLH Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu learning outcome magang
Kesembilan	28 November 2022	Izin untuk seminar proposal skripsi
	29 November 2022	Izin untuk seminar proposal skripsi
	30 November 2022	Melakukan inspeksi lingkungan DLH Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu learning outcome magang
	1 Desember 2022	Menyusun laporan hasil magang
	2 Desember 2022	Melanjutkan menyusun laporan hasil magang
Kesepuluh	5 Desember 2022	Mengkonsultasikan laporan hasil magang dan perpisahan dengan pegawai bidang I tata lingkungan
	7 Desember 2022	Melaksanakan seminar hasil magang

Lampiran II Dokumentasi Magang



Pembuatan Peta Sebaran



Pendataan Wilayah Proklamasi di Jawa Timur

	A	B	C
19	16	Kab Ponorogo	3
20	17	Kab Probolinggo	13
21	18	Kab Situbondo	4
22	19	Kab Situbondo	4
23	20	Kab Trenggalek	3
24	21	Kab Tulungagung	4
25	22	Kota Batu	3
26	23	Kota Blitar	4
27	24	Kota Kediri	12
28	25	Kota Madiun	2
29	26	Kota Malang	8
30	27	Kota Probolinggo	10
31	28	Kota Surabaya	16
32	29	Kab Bondowoso	0
33	30	Kab Jember	0
34	31	Kab Mojokerto	0
35	32	Kab Pamekasan	0
36	33	Kab Pasuruan	0
37	34	Kab Sampang	0
38	35	Kab Sumenep	0
39	36	Kab Tuban	0
40	37	Kota Mojokerto	0
41	38	Kota Pasuruan	0
42		Total	238
43			

Kunjungan Eco Pesantren





Kegiatan Senam Pagi Setiap Pagi



Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran



Membantu Kegiatan Workshop Penyusunan RPPLH

